

PERAN PEREMPUAN DALAM

PELESTARIAN MANGROVE

Bentuk interaksi dan peran perempuan di sekitar hutan mampu berdampak pada pengembangan dan pemeliharaan hutan mangrove serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga tersebut melalui pemanfaatan hasil hutan mangrove. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam melakukan peran dan interaksi terhadap hutan mangrove, bentuk dan tingkat interaksi perempuan terhadap hutan mangrove dalam kegiatan pemanfaatan dan pelestariannya, serta peran serta perempuan pada peningkatan ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan hutan mangrove.

Perempuan dapat menjadi pendidik lingkungan. Perempuan atau ibu merupakan media edukasi pertama bagi anak-anak. Melalui ibu, pendidikan dan penyadaran mengenai kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Dari penerapan pola pengelolaan sampah dan pemilihan produk yang ramah lingkungan yang dilakukan dalam sebuah keluarga, anak akan ikut terbiasa dalam menjaga lingkungan. Jika nantinya kebiasaan dan kesadaran lingkungan mengakar dalam diri anak-anak, maka pada masa depan akan tercipta generasi yang peduli lingkungan.



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: Penerbitzaini101@gmail.com
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: dkpt101@gmail.com
website: <https://www.dkpt.com/>



Talitha Wenifrida Massenga

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Editor: Marsoedi



PERAN PEREMPUAN DALAM

PELESTARIAN MANGROVE

TALITHA WENIFRIDA MASSENGA

Talitha Wenifrida Massenga

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Editor:
Marsoedi



PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Penulis:

Talitha Wenifrida Massenga

Editor:

Marsoedi

Desain Sampul dan Tata Letak

Atika Kumala Dewi

ISBN: 978-623-5722-85-6

Cetakan: Januari 2023

Ukuran: A5 (14 x 20 cm)

Halaman: vi + 161 Lembar

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Anggota IKAPI (026/DIA/2021)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue

Desa Baroh Kec. Pidie

Kab. Pidie Provinsi Aceh

No. Hp: 085277711539

Email: penerbitzaini101@gmail.com

Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2022 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Peran perempuan dalam Pelestarian Mangrove ini. Adapun buku Peran perempuan dalam Pelestarian Mangrove ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Sigli, 21 Juli 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENGERTIAN PERAN DAN KONSEP GENDER.....	1
A. Pengertian Peran.....	1
B. Pengertian Gender.....	10
C. Peran Gender.....	18
BAB II	
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER.....	31
BAB III	
PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN GENDER.....	45
BAB IV	
PERAN PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN PRODUKTIF DAN REPRODUKTIF.....	57
BAB V	
PERAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN SOSIAL BUDAYA/KEMASYARAKAT.....	73
BAB VI	
PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE.....	87

BAB VII	
TEORI PEMILAHAN PERAN	101
A. Teori Pembagian Kerja (<i>Division of Labour</i>): Emile Durkheim	104
B. Teori Tindakan Rasional: Max Weber	109
C. Teori Struktur Fungsional : Talcott Parsons	113
BAB VIII	
TEORI ANALISIS GENDER.....	117
BAB IX	
EKOSISTEM MANGROVE	129
BAB X	
KEBIJAKAN PUBLIK: GENDER, WILAYAH PESISIR DAN PELESTARIAN MANGROVE	139
A. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan .	139
B. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan.....	144
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENGERTIAN PERAN DAN KONSEP GENDER

A. Pengertian Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 1991). Hal ini senada dengan istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Alwi, 2011).

Pengertian peran menurut Soekanto (2009) yaitu, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Status sering diakronimkan menjadi kedudukan,

yang mengindikasikan posisi seseorang secara sosial di masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan memberikan seseorang sebuah peran sebagai pola interaksi dalam bersosialisasi (bermasyarakat). Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung (Ralph, 1984).

Berdasarkan pengertian peran di atas, dapat disimpulkan bahwa teori peran berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tidak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat (Suhardono, 1994).

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Sarwono (2013:215).Teori peran (role theory) adalah teori yang "merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam

sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu."

Biddle dan Thomas (1966) dalam Sarwono (1991), membagi peran menjadi empat golongan yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Syarat-syarat peran menurut Soekanto (2009) mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan Peran posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

BAB X

KEBIJAKAN PUBLIK: GENDER, WILAYAH PESISIR DAN PELESTARIAN MANGROVE

A. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Sejak 22 tahun yang lalu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984, sebab pemerintah menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia (KPPPA, 2006).

Selanjutnya, pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG), dengan harapan pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, sampai kepada evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, maka tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan

global tentang *Sustainable Development Goals* (SDG) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 tujuan (*goal*) dan 169 sasaran (*target*), dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, yaitu: mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. *Sustainable Development Goal* (SDG) mempunyai 5 target untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan
4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi

Visi dari ke 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang sedang berjalan di Indonesia (KPPPA, 2006).

Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Gender bukanlah kodrat dari ketentuan Tuhan, tetapi berkaitan

dengan keyakinan bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada (KPP, 2002a). Saat ini, yang menjadi landasan pokok untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (RI, 2000). Dengan demikian, melalui strategi PUG dapat dikembangkan kebijakan dan program yang responsif gender. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut PUG di daerah, maka pada tahun 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi, yaitu Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang pelaksanaan PUG di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Permendagri ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah. Dalam konsideran menimbang, juga ditegaskan mengenai landasan tentang urgensi penetapan Permendagri No.15 Tahun 2008, tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan

gender di daerah. Secara lengkap dinyatakan bahwa "dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah" (Depdagri, 2008).

Penguatan dari pemerintah tersebut, dapat dikatakan memberi warna terang tentang keharusan pada *stakeholder* untuk tidak mengesampingkan posisi perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan, dan tugas utama penggiat peningkatan kesetaraan perempuan adalah mempelajari lalu memperbaiki cara berpikir perempuan itu sendiri agar mau berubah. Hal ini berkaitan dengan sosiolog feminis yang menyatakan bahwa perempuan merasakan diri mereka demikian dibatasi oleh status mereka sebagai perempuan sehingga gagasan yang mereka bangun untuk kehidupan mereka hampir menjadi teori tanpa makna. Perempuan berpengalaman merencanakan dan bertindak dalam rangka mengurus berbagai kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan kepentingan orang lain, bertindak atas dasar kerjasama, bukan karena keunggulan sendiri, dan mungkin mengevaluasi pengalaman dari peran penyeimbang mereka bukan sebagai peran yang penuh konflik, tetapi sebagai respon yang lebih tepat terhadap kehidupan sosial daripada kompartementalisasi peran (Ritzer dan Goodman, 2004).

Riniwati *et al.*, (2017) juga mengatakan bahwa peran perempuan masih termarginalkan dalam pembangunan, hal ini diungkapkan dari hasil penelitian yang dilakukan di pelabuhan perikanan pantai Mayangan Probolinggo, walaupun perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pelabuhan, namun hanya di pinggiran bukan hal yang dapat memenuhi kebutuhan strategis gender.

Penyebab perempuan terisolir dari proses pembangunan adalah: (1) beban ganda dimana perempuan melakukan pekerjaan domestik dan sekaligus mencari nafkah; dan (2) kebijakan pembangunan tidak diperuntukan bagi kaum perempuan. Kaum lelaki dianggap sebagai kepala rumahtangga dan berhak untuk jadi wakil dalam komunitas yang lebih luas (Krisnawaty, 1993). Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan berprespektif gender yang merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan PUG kedalam kegiatan nyata institusi sektor. Intinya adalah mengintegrasikan permasalahan diskriminasi terhadap lelaki dan perempuan kedalam seluruh komponen perencanaan pembangunan yaitu kebijakan, program dan kegiatan, sehingga kepentingan, aspirasi dan kebutuhan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan lelaki dalam pembangunan dapat diakomodasikan secara proporsional kedalam kepentingan dan tujuan pembangunan pada institusi sektor (KPP, 2002).

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Pengelolaan Wilayah pesisir secara terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis dan terus menerus, dimana segala keputusan dibuat untuk penggunaan yang berkelanjutan, pembangunan dan perlindungan terhadap daerah serta sumberdaya pesisir dan laut (Dahuri *et al.*, 2004). Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, sumberdaya wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan, yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan berperan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, khususnya mangrove. Meskipun tidak selalu harus menggunakan mekanisme kebijakan untuk memecahkan semua permasalahan kerusakan atau konflik dalam penggunaan sumberdaya, namun hukum dan peraturan yang berlaku merupakan bagian penting dari suatu proses.

Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan bahwa "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat." (RI, 2007).

Tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RI, 2007) adalah :

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan nasional akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu. Menurut Dahuri, *et al.*, (2004) pemanfaatan sumberdaya pesisir secara sektoral tidaklah efektif.

Cincin-Sain dan Knecht (1998) menyatakan bahwa pengelolaan terpadu adalah suatu proses dinamis dan kontinyu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan dan dalam proses pengelolannya, memiliki empat tahap utama, yaitu: (1) penataan dan perencanaan, (2) formulasi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi. Sedangkan secara teknis didefinisikan sebagai suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) kawasan pesisir dan lautan untuk menyediakannya. Tulungen, *et al.*, (2003), mengartikan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu sebagai suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir.

Konteks keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi yakni dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu dan dimensi keterkaitan ekologis (Dahuri, *et al.*, 2004).

1. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*) dan

antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat (*vertical integration*)

2. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu
3. Wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistem yang satu sama lainnya saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan dan kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia di daerah daratan (*upland areas*) maupun lautan lepas (*oceans*).

Pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis, mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga

diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, partisipasi sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial dan kegiatan dunia usahanya (Soemarwoto, 2006). Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktifitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungan.

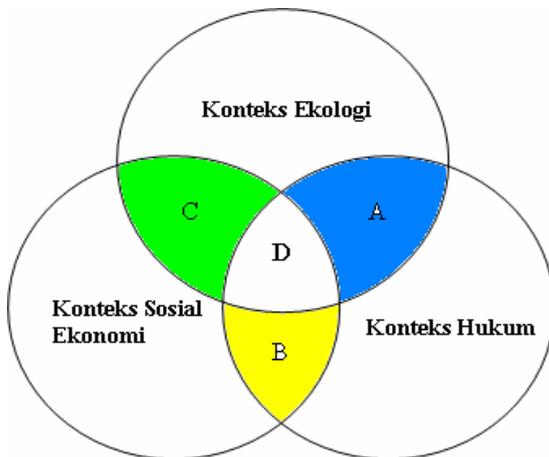
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987) dalam Dahuri, *et al.*, (2004). Selanjutnya Bengen (2004) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan visi dunia internasional sudah saatnya juga merupakan visi nasional. Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi

menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam. Dengan demikian, generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental service*) yang sama atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (*limit*) pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada didalamnya. Ambang batas yang dimaksud tidaklah bersifat mutlak (*absolute*), melainkan merupakan batasan yang luwes (*flexible*) yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan memiliki empat dimensi: (1) dimensi ekologis, (2) dimensi sosial ekonomi budaya, (3) dimensi sosial politik, dan (4) hukum dan kelembagaan. (Dahuri, *et al.*, 2004). Sedangkan Kangkan, *et al.*, (2017), yang melakukan penelitian di Nusa Tenggara Timur menambahkan satu dimensi lagi yaitu dimensi tata ruang, sehingga ada lima dimensi untuk konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, ekologi, sosial, penataan ruang dan kelembagaan, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa keberlanjutan sumberdaya pesisir Teluk Kupang, dapat diupayakan dengan model kolaborasi yang

memperhatikan faktor-faktor ekologi, ekonomi, sosial, penataan ruang dan kelembagaan.

Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem yang juga telah diperkenalkan oleh Meffe, *et al.*, (2002), menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Dalam hal ini tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integritas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia. Regim kolaboratif untuk mencapai tujuan tersebut adalah tiga pilar pengelolaan berbasis ekologi, sosial ekonomi dan institusi (Gambar 2.2). Dari gambar tersebut, terdapat 4 konteks kebijakan yang masing-masing merupakan irisan dari dua perspektif tersebut.



Gambar 2.2. Tiga Pilar Pengelolaan Berbasis Sosial-Ekosistem (Meffe, *et al.*, 2002)

Gambar 2.2. di atas dapat dijelaskan bahwa daerah A adalah zona otoritas pengelolaan (*zone of management authority*) dimana institusi pengelola mendapatkan mandat dari masyarakat untuk melakukan regulasi terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan ekosistem. Daerah B disebut sebagai daerah kewajiban masyarakat (*zone of societal obligations*) dimana kebijakan yang diambil institusi menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Sementara itu daerah C adalah daerah pengaruh (*zone of influence*) di mana dinamika keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial ekonomi terjadi dalam konteks proses dan bukan pada regulasi atau otoritas. Dengan kata lain proses saling mempengaruhi antar keduanya menjadi fokus utama dari perspektif daerah C. Terakhir daerah D sering pula disebut sebagai daerah interaksi bersama (*zone of win-win-win partnership*) di mana fokus utama pembangunan berbasis pada sistem sosial-ekologi berada. Dalam konteks ini, pandangan ketiga pilar pengelolaan berbasis sosial-ekosistem menjadi sama penting dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan yang komprehensif dan terpadu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian alam pesisir dan laut demi keberlangsungan mata pencaharian dan keamanan terhadap bencana alam. Disinilah peran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta dan kemampuan masyarakat agar mampu menjaga dan mengelola lingkungan pesisir dan laut secara bijaksana

sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara optimal dan berkelanjutan.

Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya alam laut dan pesisir yang ada di Kalimantan Tengah; melatih masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam, termasuk didalamnya mengolah sumberdaya alam tersebut agar memiliki nilai tambah sehingga manfaat ekonominya lebih tinggi, dan mencari akses pasar untuk produk-produk yang dihasilkan; melatih masyarakat untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap sumberdaya alam yang rusak; serta meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana alam di wilayah laut dan pesisir.

lam melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu dibangun semangat kegotongroyongan pada masyarakat agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih cepat tercapai dan lebih besar manfaatnya bagi komunitas dan masyarakat disekitarnya. Untuk itulah dalam setiap pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk kelompok yang mau berkomitmen untuk dibina. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan laut, juga perlu memperhatikan keterlibatan dan peran serta kaum wanita, sehingga dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2003. Pembangunan berkelanjutan ,Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Anonim, 1997. *Photovoltaics: Basic Design Principles and Components*, 1997 : 3. This document was produced for the U.S. Department of Energy (DOE) by the National Renewable Energy Laboratory (NREL).
- Anonim, 2008. *Planning & Installing Photovoltaic System. A guide for Installer Architects and Engineers* . Second edition, German 2008.
- Anonim, 2010. *Green Building Council Indonesia. GreenShip Rating Tool 1.0*. untuk Bangunan Baru, Jakarta, Green Building Council Indonesia – World Green Building Council.
- Anonim, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Acuan Perencanaan Tata Ruang, biro pembangunan. acehprov.go.id hal 2.
- Anonim, 2011. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Pekerjaan Umum.
- Ashrae 2009 Handbook – Fundamental, 14.8.
- Astuti dan A. Fajar. Mengenal Meteorologi, BMKG, D.I. Yogyakarta.
- Aziz, A, 2009. Pengaruh Material Penutup Atap terhadap Nilai RTTV, Tesis S2 Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Ayuni, M, 2012. Kerangka Kebijakan dan Instrumen Regulasi Konservasi dan Efisiensi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Workshop: Membuka Potensi Investasi untuk Efisiensi Energi di Indonesia" Jakarta, 31 Januari 2012. Hal 1 - 25.
- Budihardjo, E, 1997. *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Budihardjo, E, 1998. *Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)*, UI Press, Jakarta.
- Bonifacius, N. 2012. Optimalisasi Kondisi Termal Dan Pembangkitan Energi Pada Atap Photovoltaic Terintegrasi di Daerah Tropis Lembab. Program Doktor Program Pascasarjana Program Studi/Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya .
- Chapin, D, Fuller M. C. S and Pearson G. L, 1954. *A New Silicon p-n junction photocell for converting solar radiation into electrical power*, *J. Appl. Phys.* 25 (1954) 676.
- Ching, F. D. K. 1985. Terjemahan Ir. Paulus Hanoto Adjie. *Arsitektur : Bentuk – Ruang & Susunannya*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daldjoeni, N, 1983. *Pokok-Pokok Klimatologi*. Penerbit Alumni 1986 Bandung.
- Echols, J dan Shadily, 1982. *Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*. PT Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta.
- Effendy, N. Ashfahani, Yulinggar, dan Wardana, 2008. *Aplikasi Kontrol Logika Fuzzy pada Sistem Tracking Matahari (Sun Tracking System) Panel Photovoltaic*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2008

- (SNATI 2008) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 21 Juni 2008. G 27- G 31.
- Flavin, C dan Lenssen N, 1995. Gelombang Revolusi Energi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hakim, R dan Utomo, 2003. Komponen Perancangan Arsitektur landscape. Jakarta. Hal. 50.
- Kayo, T. 2003. *New Estimates Of The Demand For Urban Green Space: Implications For Valuing The Environmental Benefits Of Boston's Big Dig Project*, Tufts University Journal of Urban Affairs, Volume 25, Number 5, pages 641–655. Copyright # 2003 Urban Affairs Association All rights of reproduction in any form reserved. ISSN: 0735-2166. Hal. 641-655
- Kanevce, A, 2007. *Anticipated Performance Of Cu(In,Ga)Se₂ Solar Cells In The Thin-Film Limit*. For the Degree of Doctor of Philosophy Colorado State University Fort Collins, Colorado Fall 2007.
- Kazmerski and Lawrence L, 2006. *Solar photovoltaics R&D at the tipping point: A 2005 technology overview*, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 150 (2006) 105–135.
- Kusdiana, D. 2008. Kondisi Riil Kebutuhan Energi di Indonesia dan Sumber-Sumber Energi Alternatif Terbaru . Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi , Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bogor, 3 Desember 2008.
- Kristianto, A. N, 2010. Studi Kelayakan Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Di Pulau Biaro Dengan Menggunakan Metode Real Option, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lakitan, B. 1994. Dasar-dasar Klimatologi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Lang, K. R. 2003, *The Cambridge Guid to The Solar System*, Cambridge: Cambridge University Press, Inggris. Hal. 183.
- Lohonauman, Y, 2012. *Military Arcade Games* di Manado. Laporan Tugas Akhir Program Studi S1 Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Littlefair, P, 1998. *Passive Solar Urban Design Ensuring the Penetration of Solar Energy into the City, Renewable and Sustainable Energy Reviews* 2.303-326 Building Research Establishment\ Garston\ Watford\ WD1 6JR\ U[K] hal 303 – 319
- Lechner, N, 2007. *Heating, Cooling, Lighting*. Metode Desain untuk Arsitektur Edisi Kedua. Hal 198 – 232.
- Mangunwijaya, YB, 1988. Pengantar Fisika Bangunan. Djambatan Yogyakarta. Cetakan ketiga.
- Mintorogo, D. S, 2000, Strategi Aplikasi Sel Surya (*Photovoltaic Cell*) pada Perumahan dan Bangunan Komersial, *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol 28 No 2 Desember 2000. Hal. 129 – 141.
- Moniaga, I. L, 2008. Studi Ruang Terbuka Hijau Kota Manado dengan Pendekatan Sistem Dinamik. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Hal. 3 – 99.
- Muchammad dan Yohana E, 2010. Pengaruh Suhu Permukaan *Photovoltaic Module 50 Watt Peak* terhadap Daya Keluaran yang dihasilkan menggunakan Reflektor dengan Variasi Sudut Reflektor 0°, 50°, 60°, 70°, 80°, *Jurnal Teknik Mesin Rotasi – Vol. 12, No. 4, Juli 2010: 14–18 15*. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro *E-mail: m_mad5373@yahoo.com. Hal. 2.

- Naville and Richard C, 1995. *Solar Energy Conversion*. Elsevier. USA
- Nugroho, B. A, 1997. Makalah Musyawarah Nasional IV Perkumpulan Pencinta Tanaman Bandung – Bali 5 – 8 Nopember 1997 PPT dan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Hal. 46 – 49.
- Nurzal, dan Suminto, 2010. Penerapan Standar Manajemen Energi untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Standardisasi* Vol 12, No 3 tahun 2010. Hal. 174–185.
- Priatman, J, 2002. " *Energy-Efficient Architecture*" Paradigma dan Manifestasi Arsitektur Hijau, *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol.30 No 2 Desember 2002 Hal. 167-175.
- Rafii, S, 1995. *Meteorologi dan Klimatologi*, Angkasa. Bandung.
- Rahadjo, A, Herlina dan Safruddin H, 2008. Optimalisasi Pemanfaatan Sel Surya Pada Bangunan Komersial Secara Terintegrasi sebagai Bangunan Hemat Energi. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia. *Email : amien@eng.ui.ac.id*. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II 2008 Universitas Lampung, 17-18 November 2008.
- Rahmiati, M, 2009. *The Study of the Comfortness Aspect at Pedestrian Space on MH.Thamrin-Jend.Sudirman Street Jakarta.Proceeding the International Symposium of Green City " The Future Challenge"* August 10-11, 2009 IPB International Convention Center-Bogor Indonesia. Hal. 314 – 321.
- Roberts, S dan Guariento N, 2009. *Building Integrated Photovoltaics A Handbook*. Berlin.
- Romasindah, K. 2008. Optimasi Kinerja Panel Surya dengan Pengaturan Panel sebagai Sun Shading untuk Menekan

- Biaya Listrik Bangunan. Tesis Pasca Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Indonesia.
- Suryatna, R, 1995. Meteorologi dan Klimatologi, Angkasa. Bandung.
- Sangkertadi, 2002, Studi Potensi Bentuk Atap Rumah Tradisional Minahasa untuk Kajian Efektifitas Penempatan Sel-Surya. Jurnal Ekoton ISSN: 1412-3487 Vol.2 No.2. Oktober 2002 Penerbit PSL.LP Unsrat-Manado.
- Sangkertadi, 2004. Kajian Peluang Konservasi Energi Bangunan Pada Arsitektur Tradisional. Studi kasus rumah tradisional Minahasa, Jurnal Teknik, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ISSN 0854-2139, Vol.X, No.1. April 2004.
- Sangkertadi, 2006. Fisika Bangunan untuk Mahasiswa dan Praktisi Teknik dan Arsitektur, Wirausaha Muda, Bogor.
- Sangkertadi 2009. Petunjuk Pemakaian Program Matahari, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Unversitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sangkertadi dan Syafriny, 2009. *Influence of Surtace Material and Tress Dencity on Thermal Environmental and Comford for Pedestrian in Tropical and Humid Climate, Proceeding The International Symposium of Green City "The Future Challenge"* August 10-11, 2009 IPB International Convention Center-Bogor Indonesia. Hal. 327 - 341
- Sangkertadi, 2010. Perlu Kontribusi Tata Ruang terhadap Urban Environmental Accords 2005. Menuju Green City 2012, Makalah dalam Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Utara, Manado, 22 September 2010.

- Samsudi, 2010. Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, *Jurnal of Rural and Development* Vol. 1 no 1 tahun Februari 2010.
- Satwiko, P, 2009. Fisika Bangunan, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sarhaddi, 2010 .*Energetic Performance Evaluation of a Solar Photovoltaic (PV) Array, Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(3): 502-519 ISSN 1991-8178 © 2010, INSIInet Publication.
- Setiono, Yustian, Leonardus dan Pratomo, 2000. Memaksimalkan Daya *Photovoltaic* sebagai *Charger Controller*. Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 50234, Indonesia. E-mail: felix_yustian@yahoo.com .
- Sidharta, 1996. Pendidikan Arsitektur dan Masa Depan Arsitektur Indonesia. Arsitektur Bicara Tentang Arsitektur Indonesia. Editor Prof.Ir.Eko Budihardjo, M.Sc. Penerbit Alumni 1996 Bandung.
- Soemarno, 2010. Ruang Terbuka Hijau dan Lingkungan Perkotaan, PM-PSLP PPSUB Malang. Hal 11.
- Soetrisno, M. R, 2010. Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Perumnas Toddopuli Panakkukang Permai Kota Makassar. Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Hal 24-25.
- Sofian, A dan Salim, 2012. Kemandirian energi dan Kesejahteraan Rakyat. Peneliti di BPPT Kimia-LIPI & di P2 Ekonomi - LIPIKementrian Riset dan Teknologi, 2012 <http://www.ristek.go.id>(*Jurnal Nasional*, 29 Maret 2012/ *humasristek*. Hal. 1 – 3.

- Sorensen and Harry A, 1983. *Energi Conversion System*, John Willey and Sons, Canada
- Sudarisman dan Irwan, 2008. Perancangan Ruang Publik Dengan Dasar Pendekatan Perilaku (Studi Kasus: Kawasan Stasiun Kereta Api Bandung Bagian Selatan) Central Library Institute Technology Bandung Master Theses From JBPTITBPP / 2008-05-23.
- Sugiyono, A dan M.S. Boedoyo, 1999. Perubahan Pola Penggunaan Energi dan Perencanaan Energi. Hasil-Hasil Lokakarya Energi Nasional ke-17 1999. Komite Nasional Indonesia *World Energy Council*. Jakarta, 10 – 11 Maret 1999.
- Sukawi, 2011. Penerapan Konsep Sadar Energi dalam Perancangan Arsitektur yang Berkelanjutan, Prosiding Seminar Nasional AvoER ke-3 tanggal 26-27 Oktober, Palembang. Hal. 136-143.
- Suwanda, 2011. Desain Eksperimen untuk Penelitian Ilmiah, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sullivan, P.O, 1994. *Global Warming and the Built Environment*, edited by Robert Samuels dan Deo K. Prasad. E & FN Spon, London.
- Tauhid, 2008. Kajian Jarak Jangkau Efek Vegetasi Pohon terhadap Suhu Udara Pada Siang Hari di Perkotaan (Studi Kasus: Kawasan Simpang Lima Kota Semarang) Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 84.
- Vreeker, R and Nijkamp, 2011. *A Multi-Criteria Evaluation Of Green Spaces In European Cities Tüzin Baycan-Levent Istanbul Technical Sage Publications Los Angeles*, London, New Delhi and Singapore 16(2): 193–

21310.1177/0969776408101683 Copyright © 2009.
<http://eur.sagepub.com>

- Widigo, C. Wanda dan I. K. Canadharma, 2008. Pendekatan Ekologi pada Rancangan Arsitektur sebagai upaya mengurangi Pemanasan Global. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, UK Petra wandaw@peter.petra.ac.id, Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan, Universitas Pelita Harapan.
- Wibowo, R, 2009. Studi Penggunaan Solar Reflector Untuk Optimalisasi Output Daya Pada Photovoltaic Modul. Skripsi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Windy, A, 2007. Pengaruh Sudut Panel Solar Cell Merk Solarex MSX 53 Terhadap Daya yang dihasilkan. Skripsi S1 Teknik Mesin di Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Wisaksono, W, B. Sanusi, A. Nugrahanti, R. G. O. B. Situmorang, S. Abduh, I. G. O. S. Pribadi, E. Sediadi R, T. G. Amran dan A. Prayitno, 2004. Bunga Rampai Energi, Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Trisakti. Hal 68.
- Zahnd, M, 2008. Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual Kajian tentang Kawasan Tradisional di Kota Semarang dan Yogyakarta Suatu potensi perancangan kota yang efektif, Seri Strategi Arsitektur 3, Penerbit Kanisius – Soegijapranata University Press Semarang. Hal. 66, 71.